

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Laut China Selatan sejak dulu telah memegang peranan penting baik dilihat dari sisi regional maupun global. Pada zaman kolonialisme, perairan laut China Selatan merupakan jalur pelayaran dan perdagangan dunia yang melibatkan banyak negara seperti, Portugal, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Prancis. Laut China Selatan memiliki peranan penting bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan ini. Peranan penting ini mulai dari sumber daya alam perikanan, sumber daya alam, ataupun sebagai jalur pelayaran yang ramai dilewati jalur kapal dunia. Laut China Selatan adalah laut tepi, bagian dari Samudera Pasifik, mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km², merupakan laut terbesar setelah kelima samudera dan meliputi lebih dari 250 pulau dan terumbu karang yang sebagian besar tidak berpenduduk, bahkan terendam ketika air pasang.¹ Perairan tersebut dikelilingi 10 negara pantai antara lain, China, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Perairan laut China Selatan mencakup selat Taiwan, teluk Tonkin, teluk Siam, teluk Singapura, kepulauan Natuna, dan laut Sulu serta kepulauan Filipina.²

¹ "Laut Cina Selatan" www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm. Diakses tanggal 25 juni 2012 pukul 02:00 WIB,mn

² Harini, Setyasih. "Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut China Selatan". Diakses dari <http://ejournal.unisridigilib.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/214> pada 15 April 2012 pukul 02:00 WIB

Laut China Selatan merupakan tempat pertemuan berbagai kepentingan nasional di kawasan Asia Pasifik. Banyak negara di Asia Timur yang jalur hidupnya (*Sea Lines of Communication / SLOC*) tergantung kondisi keamanan maritim di perairan tersebut.³ Sejak lama laut China Selatan menjadi perhatian banyak pihak, termasuk China dan beberapa negara ASEAN. Selain menjadi jalur transportasi laut, juga memiliki sumber daya alam yang besar di kepulauan Spratly dan Paracel terutama gas alam. Laut China Selatan mengandung banyak sumber daya alam potensial yang dibutuhkan sebagai sumber energi potensial. Menurut Exxonmobil terdapat potensi signifikan minyak bumi yang terdapat di lepas pantai Vietnam.⁴ Ditambah lagi menurut *Energy International Administration (EIA)* yang dilansir oleh BBC, China memperkirakan cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel atau 10 kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat. Namun para ilmuwan AS memperkirakan jumlah minyak di sana 28 miliar barel. Menurut EIA, cadangan terbesar kemungkinan adalah gas alam. Perkiraananya sekitar 900 triliun kaki kubik, sama dengan cadangan yang dimiliki Qatar.⁵ Dengan potensi tersebut, maka perairan laut China Selatan tentunya memiliki nilai dan fungsi yang strategis. Atas dasar itulah negara-negara di sekitar perairan ini menganggap bahwa laut China Selatan penting untuk menjadi bagian dari wilayahnya.

³ Kaplan, Robert. "*The South China Sea is The Future of Conflict*". Diakses dari http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/08/15/the_south_china_sea_is_the_future_of_conflict pada 23 Juli 2012 pukul 02:00 WIB

⁴ "China-US Energy Geopolitics: The Battle for Oil in the South China Sea" Diakses dari <http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27385> pada 15 April 2012 pukul 02:00 WIB

⁵ "Sengketa Kepemilikan laut China Selatan" Diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict.shtml pada 15 April 2012 pukul 02:00 WIB

Kepulauan Spratly secara geografis letaknya lebih dekat dengan Filipina. Secara astronomis kepulauan Spratly terletak di 4° LU dan 109° BT ke arah Barat Laut antara 11° 31' LU dan 117° BT. Kepulauan ini dibatasi oleh wilayah perairan dari beberapa negara yaitu : Philipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang lebih 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin (P.Hainan) China dan 500 Km dari pantai Kalimantan bagian utara.⁶ Letak kepulauan Spratly cukup strategis karena dilewati oleh jalur perdagangan internasional, ditambah lagi, kepulauan ini mempunyai sumber daya alam hayati dan non-hayati (tembaga, hidrokarbon, gas dan minyak bumi) yang melimpah. Kepulauan Paracel secara geografis letaknya berdekatan dengan Vietnam. Menurut CIA, secara astronomis, kepulauan Paracel berada di 16° 30 LU, 112° 00 BT. Kepulauan ini hanya terdiri dari sekitar 130 pulau kecil dan karang-karang.⁷ Sama halnya dengan kepulauan Spratly, kepulauan Paracel juga mempunyai cadangan minyak bumi dan gas alam.⁸

Energi merupakan suatu kebutuhan krusial yang harus dipenuhi untuk kelangsungan perekonomian suatu negara. Tanpa energi, suatu negara akan mengalami kemacetan dalam menjalankan kegiatan industri yang pada akhirnya dapat menghambat laju roda perekonomian suatu negara. Kepastian dalam

⁶ “Tindakan Cina atas Klaim Sepihak Wilayah kepulauan Spratly” oleh Law Department ALSA LC Brawijaya (online) Diakses dari <http://alsaindonesia.org/site/tindakan-cina-atas-klaim-sepihak-wilayah-kepulauan-spratly/> pada tanggal 20 Januari 2013 pukul 02:45 WIB

⁷ “East & Southeast Asia : Paracel Islands”. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pf.html> pada tanggal 20 Januari 2013 pukul 03:00 WIB

⁸ “Contested Areas of South China Sea Likely Have Few Conventional Oil and Gas Resources”. Diakses dari <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10651> pada tanggal 20 Januari 2013 pukul 02:00 WIB

mendapatkan pasokan energi yang dibutuhkan untuk kemudian digunakan menggerakkan kegiatan produksi negara secara kontinuitas merupakan inti dari keamanan energi.

Dari perspektif sejarah, negara-negara maju menggunakan sumber daya alam energi yang diimpor dari negara lain untuk kebutuhan dalam negeri mereka. Sekarang cukup banyak negara maju yang masih sangat mengandalkan impor minyak dan gas alam dari negara lain. Dalam perekonomian global, alokasi sumber daya energi yang sangat besar adalah harga yang harus dibayar negara yang ingin maju. Dari sinilah muncul berbagai upaya dari setiap negara untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pasokan energi yang sangat penting tersebut. Untuk mendapatkan jaminan atas ketersediaan dan keamanan pasokan energi, suatu negara dapat memilih bertindak bersahabat dengan bekerjasama melalui hubungan bilateral maupun melalui tindakan ekstrem dengan menyerang suatu negara yang memiliki sumber energi yang melimpah menggunakan kekuatan militer.

Permasalahan dalam perebutan klaim kepemilikan kepulauan Paracel dan Spratly sudah berlangsung semenjak puluhan tahun yang lalu. Permasalahan ini lebih banyak dipicu dari faktor agresifitas China yang menanamkan klaimnya sejak 1940an, dan ditambah negara-negara di sekitar wilayah perairan ini yang merasa bahwa China terlalu “serakah” dalam klaimnya. Kedua kepulauan ini biarpun menjadi target utama perebutan kepemilikan negara-negara besar seperti China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura, tetapi kedua kepulauan ini hanya berbentuk kumpulan karang-karang yang sebenarnya tidak layak untuk

dihuni. Konflik pertama antara China dan Vietnam berlangsung pada Januari tahun 1974 bertempat di kepulauan Paracel. Pada tahun 1974, ketika perang dingin masih berlangsung, Vietnam Selatan menghadapi China dalam perebutan kepulauan Paracel. Ketika masa itu, biarpun suasana politik di Vietnam masih tidak stabil, pemerintah Vietnam Selatan tetap memperkuat penjagaan di pulau Pattle, pulau terbesar di kepulauan Paracel. Pada konflik bersenjata pertama antara China dan Vietnam ini, pasukan pertahanan Vietnam Selatan yang berjaga di pulau Pattle dikalahkan oleh China.⁹ Sejak kemenangan China atas Vietnam di kepulauan Paracel ini, China menganggap bahwa kepulauan Paracel sudah menjadi milik China.

China mengemukakan klaimnya berdasarkan bukti sejarah yaitu peta-peta nelayan yang berasal dari dahulu kala. China mengklaim bahwa wilayah laut China Selatan sudah ada di bawah kekuasaan China semenjak zaman dinasti Han, Yuan, Ming. Di samping itu China juga mengajukan klaim berdasarkan perjanjian perbatasan antara China dengan Perancis di tahun 1887 ketika Vietnam menjadi wilayah perlindungan Perancis, dan kepulauan Spratly dan Paracel diserahkan kepada China.¹⁰ Sengketa teritorial di kawasan laut China Selatan khususnya sengketa atas kepemilikan dan penguasaan kepulauan Spratly dan Paracel mempunyai perjalanan sejarah konflik yang panjang dan telah melibatkan banyak

⁹ "China and Vietnam : a Timeline of Conflict". Diakses dari <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/06/27/china.vietnam.timeline/index.html> pada 2 Juli 2013 pukul 01:34 WIB

¹⁰ Lim Jo Jock, 1979, *Geostrategy and South China Sea Basin*, Singapore : Singapore University Press, hlm 41-47

Negara seperti, Inggris, Perancis, Jepang, RRC, Vietnam yang kemudian melibatkan pula Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan.

Vietnam juga mengajukan klaimnya berdasarkan aspek historis dan mengkombinasikannya dengan hukum internasional. Vietnam mengklaim sudah menguasai kepulauan itu sejak abad 17. Klaim Vietnam atas kepulauan Paracel berdasarkan perolehan Kaisar Gia Long tahun 1802 yang kemudian menggabungkannya dengan Vietnam di tahun 1832. Pada pemerintahan Kaisar Minh Mang pada tahun 1834 juga telah mendirikan pagoda dan tanda batu di kepulauan Spratly. Menurut Heinzig dari sudut sejarah, tuntutan Vietnam lebih lemah dari pada China karena Vietnam mengalami kesulitan untuk membuktikan kesinambungan penguasaan mereka atas negara dan wilayah sejak tahun 211SM akibat penjajahan Perancis setelah sempat merdeka dalam jangka waktu yang singkat. Vietnam mengemukakan bahwa banyak dokumen yang menunjukkan kepemilikan Vietnam atas kepulauan Spratly telah dimusnahkan oleh China pada waktu China menjajah Vietnam.

Setelah Perang Dunia II, Vietnam mengemukakan dasar tuntutannya dengan menunjuk pada perjanjian perdamaian San Fransisco 1951. Vietnam yang pada waktu itu hadir dan menandatangani perjanjian ini telah menegaskan tuntutannya atas kepulauan Paracel seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Republik Vietnam saat itu yaitu Tran Van Huu yang menyatakan bahwa kepulauan Paracel

selalu menjadi milik Vietnam. Tahun 1956 Vietnam memasukkan kepulauan Paracel ke dalam provinsi Phuoc Tuy dengan dekrit 2 Oktober 1956.¹¹

Sengketa antara China dan Vietnam mencakup kepemilikan kepulauan Spratly dan Paracel. Sengketa antara kedua negara ini di laut China Selatan adalah satu-satunya konflik yang tercatat pernah menyebabkan jatuhnya korban jiwa yaitu pada konflik militer terbuka di tahun 1974 dan 1988. Sebelum 2 konflik bersenjata ini, China dan Vietnam menguasai sebagian kepulauan Paracel.¹² Dengan dipersengketakannya kepulauan Spratly dan Paracel seharusnya menjadi tanggung jawab negara-negara yang bertikai untuk menjaga kestabilan di wilayah perairan ini. Konvensi Hukum laut (UNCLOS) pasal 283 mengenai penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa, jika terjadi sengketa antar anggota atau perbedaan penafsiran terhadap konvensi ini harus diselesaikan secara damai.¹³ Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran berupa pengiriman kapal perang dan pesawat tempur di wilayah yang disengketakan yang dilakukan oleh pihak China. Hal tersebut menunjukkan kurangnya iktikad baik pada pihak China terkait penyelesaian wilayah tersebut. Sedangkan dari pihak Vietnam, itikad kurang baik ditunjukkan dengan cara kerja sama dengan perusahaan energi seperti

¹¹ Deplu RSV, 1981, *White Paper in the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagos Vietnamese Territories*, hlm 16

¹² "Laut China Selatan Makin Penting". Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/09/08/17563959/Laut.China.Selatan.Makin.Penting>

¹³ "United Nations Conventions Law of The Sea" diakses dari http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm pada 17 April 2012 pukul 03:00 WIB

Oil and Natural Gas Company (ONGC) dari India untuk eksplorasi komoditas minyak di kepulauan Paracel.¹⁴

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu: “bagaimana terjadinya konflik sumber daya alam antara China dan Vietnam dalam perebutan kedaulatan kepulauan Paracel dan kepulauan Spratly periode tahun 2002-2012?”

Penelitian ini mengambil periode tahun 2002 hingga 2012. Alasan kenapa penulis mengambil periode ini adalah karena tahun 2002 adalah tahun dicanangkannya *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC)* yang ditanda-tangani oleh kesepuluh negara ASEAN dan China. Hingga tahun 2012 dicanangkannya *Code of Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC)* yang juga oleh kesebelas negara untuk menjaga ketentraman di kawasan laut China Selatan. Penulis meneliti mengenai konflik antara China dan Vietnam dalam perebutan kedaulatan atas kepulauan Paracel dan Spratly pasca ditanda-tanganinya DOC.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai proses terjadinya konflik sumber daya alam antara China dan Vietnam dalam perebutan kepemilikan kepulauan Paracel dan kepulauan Spratly di laut China Selatan pada

¹⁴ “ONGC Videsh Signs an Agreement With PetroVietnam”. Diakses dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-10-12/news/30271115_1_ongc-videsh-petrovietnam-exploratory-blocks pada 29Juni 2013 pukul 01:00 WIB

tahun 2002 hingga tahun 2012.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan data di dalam jurusan Hubungan Internasional terutama konsentrasi Pengkajian Strategi mengenai perilaku konflik China dan Vietnam dalam merebutkan sumber energi di kepulauan Parcel dan kepulauan Spratly.
2. Secara praktis dapat membantu khalayak luas memahami konflik di kepulauan Parcel dan Spratly dari sudut pandang konsep keamanan energi.

I.5 Tinjauan Pustaka

I.5.1 Komplikasi Konflik Laut China Selatan

Wu Shicun dan Zou Keyuan meneliti tentang keadaan di laut China Selatan dalam bukunya *Maritime Security in the South China Sea* yang diterbitkan oleh Ashgate Publishing Limited A pada tahun 2009 membahas bagaimana keamanan laut di kawasan laut China Selatan.¹⁵ Bagaimana upaya China meyakinkan bahwa perairan tersebut adalah perairan milik China dan di bawah kedaulatan China. Alasan mengapa buku ini masuk dalam tinjauan pustaka bagi penulis adalah karena buku ini menerangkan bagaimana China melanggar DOC yang sudah ditanda-tangani bersama-sama kesepuluh negara ASEAN.

¹⁵ Sichun Wu, Keyuan Zou. *Maritime Security in the South China Sea*. Ashgate Publishing Limited. 2009. Hlm 349

Laut Cina Selatan dapat dinilai secara geopolitik, ekonomi dan strategis, sebagai salah satu laut yang paling penting di dunia. Ini menarik perhatian dalam pemikiran kontemporer dalam hubungan internasional dan studi strategis, dan terus dilihat sebagai *"hot spot"* yang bisa menjadi sumber ketegangan atau bahkan konflik di Asia Timur. Kebutuhan ketertiban di laut di laut Cina Selatan adalah kepentingan bersama yang kuat dari negara-negara yang berbatasan dengan laut, Amerika Serikat dan yang maritim kekuatan yang muncul dari Asia-China, India, Jepang dan Korea Selatan.

Ada tujuh negara yang berbatasan dengan laut Cina Selatan. Lima negara tersebut, sebagaimana serta Taiwan, mengklaim beberapa atau semua dari pulau-pulau lepas pantai dan terumbu yang terdapat di antara daratan Asia Timur dan Indonesia dan kepulauan Filipina. Semua negara-negara berpatokan pada UNCLOS dan dengan demikian jelas memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam hal pengelolaan laut Cina Selatan, termasuk pemeliharaan ketertiban di laut. Sayangnya berbagai upaya untuk melakukannya, terutama dalam beberapa tahun terakhir, telah terbukti sangat sulit untuk menetapkan rezim manajemen yang efektif untuk wilayah perairan ini.

Sebagian besar negara-negara Asia adalah negara-negara yang sudah lama bekerja sama dalam bidang ekspor-impor dengan negara-negara Asia lainnya. Pertumbuhan perdagangan ini akibat dari kemajuan umum dari integrasi regional di Asia. Mengenai Asia Tenggara, pada Januari 2003, negara-negara yang tergabung dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN memperbaharui komitmen mereka untuk mempromosikan perdagangan regional dengan menandatangani

protokol perubahan persetujuan pada *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), di mana bea masuk akan dihilangkan.

Buku kedua yang akan menjadi acuan bagi penulis dalam membahas kompleksitas konflik perebutan kedaulatan di wilayah laut China Selatan *The Security Dilemmas of Southeast Asia* oleh Allan Collins yang diterbitkan oleh Macmillan Press LTD di tahun 2000.¹⁶ Membahas kompleksitas masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara terutama negara-negara yang bertikai dengan China dalam masalah laut China Selatan. China akan muncul menjadi sebuah negara yang ideal menjadi korban dilema keamanan. Sebuah sejarah yang mengajarkan bahwa China mengalami 'penghinaan' di tangan orang asing adalah landasan utama dalam strategi diplomasinya, dan mencerminkan keharusan dalam keprihatinan domestik di hubungan luar negerinya, dengan menunjukkan negara yang harus curiga terhadap tindakan orang lain, namun tidak mempertimbangkan bahwa negaranya sendiri menjadi ancaman bagi negara sekitar, dan akan umumnya kebal terhadap ketidakamanan dengan menanggapi tindakan orang lain itu. Weixing Hu dan Avery Goldstein telah mencatat penerapan dilema keamanan ke Cina. Hu menulis bahwa meskipun Beijing telah berulang kali membantah bahwa memiliki minat dalam mengisi kekosongan kekuasaan, modernisasi militer secara alami dianggap sebagai ancaman keamanan di wilayah ini. Masalah ini berkontribusi pada "dilema keamanan" di Asia-Pasifik.

Buku ini menggunakan konsep dilema keamanan untuk meneliti hubungan ASEAN-China, mengungkapkan kesadaran dalam rezim ASEAN. Hal ini juga

¹⁶ Collins Allan. *Security Dilemmas of Southeast Asia*. Macmillan Press LTD. 2000

mengungkapkan ketidak-percayaan dan kecurigaan tersisa tentang niat China di antara anggota ASEAN, yang membuat unsur penahanan dianggap sebagai alat yang sama diperlukan dalam hubungan ASEAN-China. Ini kombinasi dari penahanan dan keterlibatan dicontohkan oleh keanggotaan *ASEAN Regional Forum* (ARF). Sebuah forum dialog mengenai masalah keamanan, keanggotaan ARF termasuk China, dan memang ARF akan menjadi tidak berarti tanpa partisipasi Beijing, sementara juga termasuk Amerika Serikat yang baru-baru ini masuk ke India untuk menyeimbangkan Cina. Alasan buku ini masuk ke dalam tinjauan pustaka adalah bahwa buku ini juga meneliti keadaan konflik yang terjadi di antara China dan Vietnam dari sudut pandang dilema keamanan.

I.5.2 Keamanan Energi

Pada buku *Security Studies an Introduction*, Michael T. Klare mengungkapkan bahwa keamanan energi merupakan kepentingan dasar setiap individu.¹⁷ Bahkan manusia paling primitif harus mengkonsumsi makanan untuk mendapatkan energi untuk berburu, mengumpulkan lebih banyak makanan dan bahan-bahan penting lainnya, membangun tempat perlindungan dari ancaman luar. Masyarakat yang lebih kompleks membutuhkan energi untuk mendapatkan makanan dan air dan untuk membangun kota, benteng, pabrik, kapal, jalan, kereta api dan sebagainya. Bagi masyarakat yang lebih kompleks dan produktif, energi digunakan untuk tindakan produktif dengan tujuan untuk menaikkan taraf hidupnya

¹⁷ Williams, Paul. *Security Studies : an Introduction*. Routledge. 2008

Negara mempunyai 2 pilihan dalam pemenuhan kebutuhan energinya, yang pertama adalah bekerjasama dengan negara lain dalam bidang energi dan yang kedua adalah mengeksplorasi tanah airnya untuk memenuhi kebutuhan energinya. Di buku ini, Klare mengambil contoh negara Amerika Serikat dalam usahanya untuk mendapatkan energi bagi kelangsungan industri dalam negerinya. Berbagai usaha dilakukan Amerika Serikat dalam pencarian energinya, bahkan ketika usaha itu menggunakan kekuatan militernya atas negara lain. Untuk Amerika Serikat, perlindungan terhadap negara pemasok minyak bumi seperti Arab Saudi dan penjagaan jalur transportasi minyak bumi seperti selat Hormus, teluk Persia dan laut Arab telah menjadi strategi nasionalnya.

Tapi keamanan energi dapat memiliki arti lain, terutama untuk negara-negara yang sangat bergantung pada pasokan energi mereka pada hanya beberapa sumber tetapi dalam posisi tawar-menawar yang lemah dan karena itu rentan terhadap tekanan politik. Kejadian ini seperti pada kasus beberapa negara pecahan Uni Soviet yang mengandalkan Rusia untuk pengadaan minyak bumi dan gas alam, terutama Ukraina, Belarus, dan Georgia. Ketika Rusia mengancam akan menghentikan pasokan minyak bumi dan gas alamnya, maka negara-negara yang bergantung kepada Rusia ini terpaksa menuruti apa yang diinginkan oleh Rusia.

Keamanan energi akhirnya memiliki berbagai arti tergantung posisi mana satu negara berada. Hampir semua negara hal ini berarti mengamankan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penting, baik sekarang maupun di masa depan. Ini berarti, dalam kebanyakan kasus, diversifikasi jenis energi yang keadaan bergantung dan berinvestasi dalam ramah iklim energi alternatif. Selain

itu, untuk negara yang bergantung sebagian besar pada impor sumber pasokan keamanan energi juga menggabungkan sebuah dimensi kebijakan luar negeri yang signifikan dalam hal mempertahankan hubungan persahabatan dengan negara pemasok energi.

Pada 3 buku yang digunakan oleh penulis dalam daftar tinjauan pustaka, ketiga buku itu menjelaskan kompleksitas yang terjadi di laut China Selatan. Mulai dari kedaulatan negara yang hanya bisa ditentukan oleh negara tersebut, hingga kegagalan hukum internasional dan perjanjian internasional dalam mengatur perilaku negara-negara yang bertikai di laut China Selatan. Penulis membahas bagaimana kedua negara biarpun sudah berjanji untuk menjaga ketentraman di kawasan laut China Selatan, tapi kedua negara tetap melakukan tindakan yang dianggap ilegal dalam mendapatkan kepulauan Paracel dan Spratly. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bahwa sumber daya alam yang berada di kepulauan Paracel dan Spratly menjadi kepentingan nasional bagi China dan Vietnam.

I.6 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 teori dalam menjawab pertanyaan penelitian yaitu teori Kepentingan Nasional, teori Keamanan Energi, dan yang terakhir adalah teori Konflik. Teori Kepentingan Nasional akan menjelaskan mengapa secara umum, kepulauan Paracel dan Spratly sangat penting bagi China dan Vietnam. Teori kedua adalah teori Keamanan Energi, teori ini digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan sejauh apa China dan Vietnam membutuhkan energi di kepulauan Paracel dan Spratly. Teori ketiga yaitu teori

Konflik, teori ini menjelaskan selama periode 10 tahun, apa saja yang terjadi antara China dan Vietnam dalam perebutan kepulauan Paracel dan Spratly.

I.6.1 Kepentingan Nasional

Kerangka teori mengenai kepentingan nasional suatu negara dan bagaimana kepentingan nasional itu menggerakkan suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Teori mengenai kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau:

“ The concept of the national interest, then, contains two elements, one that is logically required and in that sense necessary, and one that is variable and determined by circumstances ”¹⁸

Dengan demikian teori kepentingan nasional menurut Morgenthau pada dasarnya terdiri dari dua elemen, yang pertama didasarkan pada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan yang kedua mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan strategis disekitarnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat diperoleh dengan cara melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan integritas wilayah nasional, sistem politik, dan identitas budaya dari ancaman bangsa lain. Adapun pertimbangan adanya berbagai kondisi lingkungan strategis adalah dengan menjalankan kebijakan politik luar negeri melalui upaya diplomasi demi terciptanya perdamaian dunia.

I.6.2 Keamanan Energi

¹⁸ Hans J. Morgenthau, “ Another “ Great Debate ” : The National Interest of the United States, ” in *Classics of International Relation*, 3rd ed, ed. John A. Vasquest (New Jersey: Prentice Hall, 1966), 147.

Selanjutnya penulis akan menggunakan konsep keamanan energi yang dikeluarkan oleh Matthew H. Brown:

*“Energy security refers to a resilient energy system. This resilient system would be capable of withstanding threats through a combination of active, direct security measures—such as surveillance and guards—and passive or more indirect measures—such as redundancy, duplication of critical equipment, diversity in fuel, other sources of energy, and reliance on less vulnerable infrastructure”*¹⁹

Brown menerangkan bahwa energi sangatlah penting bagi satu negara. Dengan adanya energi maka kegiatan produksi negara akan terus berjalan dan berarti perekonomian satu negara akan aman. Dengan amannya perekonomian satu negara maka negara tersebut akan mampu meningkatkan kekuatan militernya dan menjadikannya aman dari serangan negara lain atau mampu menambah kekuatan untuk mendapatkan kepentingannya.

I.6.3 Konflik

Teori konflik yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Teori Konflik menurut K.J. Holsti

“Conflict leading to organized violence emerges from a particular combination of parties, incompatible over an issue, hostile attitudes, and certain types of diplomatic and military actions. The parties to an international conflict are normally, but not necessarily, the governments of nation-states. An issue field is the subject of contention between the parties and includes the positions they are attempting to achieve. The term tensions refers to the set of attitudes and predispositions—such as distrust and suspicion—that populations and policy makers hold toward any other parties. Finally, conflict include the actions—the diplomatic,

¹⁹ Brown, Mathew H. *Energy Security*. National Conference of State Legislatures. 2003. Hlm 7

propagandist, commercial, or military threats and punishment—that the contending parties take toward each other."²⁰

Menurut Holsti, konflik adalah tindakan kekerasan yang teroganisir yang ditimbulkan dari kombinasi 3 indikator, ketidak-cocokan posisi aktor-aktor dalam sebuah isu, perilaku kasar, dan beberapa tipe dalam tindakan diplomatis dan tindakan militer. Aktor dalam konflik hubungan internasional yang utama adalah negara, biarpun dalam hal ini, pemberontak, teroris, organisasi internasional juga dapat disebut sebagai aktor dalam konflik dalam hubungan internasional. Dalam konflik hubungan internasional aktor-aktor bisa mempunyai beberapa ojektif dalam berkonflik, misalnya, wilayah, penguasaan dalam sumber daya alam, penggulingan pemerintah yang sedang berkuasa (kudeta), dan masih banyak yang lain. Ada 3 komponen dalam menganalisa konflik menurut Holsti, ruang lingkup isu, ketegangan dan tindakan.

Komponen pertama yang digunakan oleh Holsti dalam menganalisa sebuah konflik internasional adalah ruang lingkup isu. Ruang lingkup isu ini menjelaskan bagaimana posisi para aktor yang berkonflik dalam mendapatkan apa yang mereka ingin raih. Di ruang lingkup isi ini juga meneliti mengenai perilaku konflik para aktor, misalnya konflik dalam perebutan wilayah di antara dua atau lebih aktor. Dalam penguasaan wilayah ini, Holsti berusaha menjelaskan apa saja dan bagaimana tindakan para aktor dalam mengakuisisi sebuah wilayah yang merupakan kepentingan utama mereka. Holsti juga meneliti ke arah mana sebuah

²⁰ Holsti KJ. *International Politics ; a Framework of Analysis*. A Simon & Schuster Company. 1992. Hlm 349

konflik berjalan, sangat tergantung pada tindakan para aktor yang terlibat di konflik tersebut.²¹ Misalnya ketika ada dua negara yang memperebutkan satu wilayah yang sama, dan kedua negara ini mempunyai kekuatan militer yang sangat berbeda, maka negara yang mempunyai kekuatan militer yang lebih besar akan mengandalkan kekuatan militernya untuk mendapatkan wilayah ini, sedangkan negara yang mempunyai kekuatan militer lebih kecil biasanya akan mengandalkan dukungan dari dunia internasional untuk bisa menandingi kekuatan militer lawannya atau juga dengan mengandalkan forum multilateral untuk memberikan tekanan pada negara lawannya.

Komponen kedua adalah ketegangan, ketegangan yang dimaksud Holsti disini adalah ketegangan yang terjadi di antara para aktor yang berkonflik. Menurut Holsti, ketegangan ini adalah fase di mana terjadinya kecurigaan antara dua aktor. Menurut Holsti, ketegangan ini biasa disebabkan tingkah laku lawan, posisi lawan yang tidak semestinya, ketidak-percayaan, dan kecurigaan yang tumbuh di antara para aktor. Ketegangan masih belum dinilai bisa memacu konflik, ketegangan hanya merubah perilaku para aktor yang berkonflik. Perubahan perilaku di antara para aktor ini biasanya berbentuk pada peningkatan kewaspadaan para aktor terhadap lawannya atau bisa dalam percepatan persiapan dalam mencapai tujuannya.

Faktor terakhir yang digunakan Holsti dalam menganalisa konflik adalah, tindakan. Tindakan yang diambil para aktor ini, bisa dalam bentuk tindakan

²¹ *Ibid*

militer, propaganda, dan lain-lain. Tindakan yang diambil para aktor terhadap lawannya yang akan menentukan sejauh mana konflik ini akan berkembang.²²

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi :

Konflik perebutan kepulauan Paracel dan Spratly, terutama yang terjadi antara Vietnam dan China berawal dari kebutuhan mereka akan energi yang terdapat di kedua kepulauan tersebut.

²² *ibid*

I.9 Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis pendekatan kualitatif yaitu jenis data yang dapat berkembang dan meluas. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.²³

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dapat mendukung pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian serta secara keilmuan dapat dibuktikan. Data primer yang digunakan adalah pernyataan resmi dari pemerintah seperti buku putih, kutipan pernyataan dari lembaga pemerintahan. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet.

²³ “Penelitian Kualitatif”. Diakses dari <http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/11/penelitian-kualitatif-339265.html> Pada 2 Mei 2013 pukul 03:12 WIB

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian teoritis yang bertujuan untuk menelusuri dan mencari dasar-dasar yang berkaitan erat dengan penelitian secara teori yang mencakup masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional.²⁴

I.10 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

Bab I akan berisi pendahuluan, pendahuluan ini berisikan sub-bab latar belakang mengenai penyebab terjadinya konflik. Sub-bab latar belakang ini juga berisi permasalahan pokok, tujuan, serta manfaat penelitian. Sub-bab lainnya adalah kerangka pemikiran, yang berisikan tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II penulis secara umum akan menjelaskan mengenai laut China Selatan sebagai area konflik bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah

²⁴ “Kajian Pustaka” diakses dari <http://www.docstoc.com/docs/124607616/Kajian-Pustaka> pada 27 April 2013 pukul 01:13 WIB.

perairan ini. Kemudian di sub bab pertama penulis akan menjelaskan mengenai dinamika klaim kepemilikan kepulauan Paracel dan Spratly oleh China dan Vietnam dan negara-negara yang berbatasan dengan kedua kepulauan ini. Di sub bab kedua, kebutuhan energi China dan Vietnam periode 2002-2012. Selanjutnya di sub bab terakhir, penulis akan menjelaskan mengapa kepulauan Paracel dan Spratly menjadi kepentingan nasional bagi China dan Vietnam.

Bab III penulis akan menjelaskan mengenai konflik yang terjadi antara China dan Vietnam dalam memperebutkan kepulauan Paracel dan Spratly beserta analisa konflik menurut teori yang dipakai penulis.

Bab IV akan menjadi penutup dari hasil penelitian dari penulis. Bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini peneliti mencoba menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis pada bab II dan III.

